CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

OPTIMALISASI POTENSI DAERAH SEBAGAI PENGGERAK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH

Sepvania Berlian Rengganis[1], Fauzia Istiqomah[2], Amelia Nais Agustin[3], Zahra Nur Azizah[4], Balqis Namira Ramadhani[5], Muthia Cahya Putri Hidayah[6], Febra Anjar Kusuma[7]

Email: sepvaniaberlian@gmail.com, fauziaistiqomah099@gmail.com, amelianaisagustin11@gmail.com, zahranurazizah0206@gmail.com, balqisnamira06@gmail.com, thiabta513@gmail.com, febraanjar@fkip.unila.ac.id
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Lampung

Abstract

Regional autonomy requires local governments to finance development and public services independently, yet many regions still depend on central government transfers. In Lampung Province, most leading commodities are still sold as unprocessed raw materials, limiting their economic value added. This study aims to explain the relationship between regional potential and fiscal capacity, the role of regional potential in improving community welfare, and the challenges and strategies for strengthening fiscal independence. It employs a literature review with a qualitative descriptive approach, using secondary data from relevant journal articles. The case studies cover cassava-based mocaf flour and vacuum-packed catfish in Pringsewu Regency, robusta coffee in West Lampung Regency, and tapis cloth in Pesawaran Regency. Developing regional potential through downstreaming can broaden the base of local taxes and levies, create jobs, and raise community income levels. Fiscal independence is hindered by dependence on transfer funds, underutilized local potential, limited human resources and technology, and ineffective regional budget management. The recommended strategies include mapping leading potentials, downstreaming MSME products, optimizing local taxes and levies, allocating targeted budgets, and strengthening cooperation among government, communities, and the private sector. Optimizing regional potential, accompanied by efficient regional financial management, can sustainably strengthen fiscal independence and community welfare.

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Lampung
[2] Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Lampung
[3] Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Lampung
[4] Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Lampung
[5] Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Lampung
[6] Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Lampung
[7] Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Lampung

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Keywords*: Regional Potential*, *Fiscal Independence*, *Locally Generated Revenue*, *Downstreaming*, *Community Welfare*.

Abstrak

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah mampu membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri, tetapi banyak daerah masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Di Provinsi Lampung, sebagian besar komoditas unggulan masih dipasarkan sebagai bahan mentah tanpa pengolahan sehingga nilai tambah ekonominya belum optimal. Penelitian ini bertujuan menjelaskan hubungan antara potensi daerah dan fiskal daerah, peran potensi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta tantangan dan strategi penguatan kemandirian fiskal daerah. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif terhadap data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah yang relevan. Studi kasus mencakup tepung *mocaf* dan lele vakum di Kabupaten Pringsewu, kopi robusta di Kabupaten Lampung Barat, serta kain tapis di Kabupaten Pesawaran. Pengembangan potensi daerah melalui hilirisasi berpotensi memperluas basis pajak dan retribusi daerah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemandirian fiskal terhambat oleh ketergantungan pada dana transfer, pemanfaatan potensi lokal yang belum maksimal, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta pengelolaan anggaran daerah yang belum efektif. Strategi yang direkomendasikan meliputi pemetaan potensi unggulan, hilirisasi produk UMKM, optimalisasi pajak dan retribusi, penganggaran tepat sasaran, serta kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Optimalisasi potensi daerah yang disertai pengelolaan keuangan yang efisien dapat memperkuat kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata kunci: Potensi Daerah, Kemandirian Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Hilirisasi, Kesejahteraan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, termasuk pembiayaan pembangunan dan operasional daerah. Namun, ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), masih menjadi tantangan dalam mewujudkan kemandirian fiskal. Dalam hal ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya secara mandiri.

Optimalisasi PAD dapat dilakukan melalui intensifikasi pajak dan retribusi serta ekstensifikasi sumber pendapatan, seperti pengelolaan aset daerah dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemandirian fiskal yang kuat memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat (Dewi & Susilawati, 2024).

Permasalahan kemandirian fiskal juga dihadapi Provinsi Lampung. Sebagian besar komoditas unggulan daerah masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah ekonominya belum optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya hilirisasi produk UMKM berbasis potensi lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat PAD.

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi untuk mengembangkan hilirisasi tersebut. Pada 2021, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Pringsewu sebesar 24,11%, diikuti sektor industri pengolahan sebesar 15,23%. Namun, berdasarkan analisis *Location Quotient (LQ),* kedua sektor tersebut tergolong non-basis dengan rata-rata LQ masing-masing sebesar 0,85 dan 0,80. Hal ini menunjukkan bahwa kedua sektor tersebut belum memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pasar di luar wilayah kabupaten. Meskipun demikian, sektor pertanian memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, yaitu sebesar 43,03% pada triwulan IV 2021 (Widiniarsih & Putri, 2023).

Salah satu upaya mengoptimalkan potensi tersebut adalah melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki karakteristik padat karya, memanfaatkan sumber daya lokal, serta fleksibel dalam menghadapi perubahan pasar sehingga relatif mampu bertahan dalam kondisi krisis. Di Kabupaten Pringsewu, industri makanan, minuman, dan bahan galian bukan logam menjadi kelompok usaha yang berperan besar dalam sektor industri. Produk agroindustri seperti keripik, kelanting, dan kerupuk juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengembangan UMKM masih menghadapi kendala berupa keterbatasan modal, sumber daya manusia, dan pemasaran. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM berbasis industri kreatif di Kecamatan Pringsewu. Akan tetapi, pemerataan bantuan sarana dan prasarana bagi pelaku usaha masih belum optimal (Rachmawaty, 2022).

Penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek terkait PAD dan pengembangan ekonomi daerah. Kajian mengenai PAD umumnya berfokus pada pajak, retribusi, pengelolaan aset, dan regulasi. Sementara itu, penelitian di Kabupaten Pringsewu lebih banyak membahas pemetaan sektor ekonomi, kebijakan UMKM, serta inovasi pada usaha tertentu. Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan hilirisasi produk UMKM berbasis potensi lokal dengan peningkatan PAD dan kemandirian fiskal daerah masih terbatas. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada kajian hilirisasi bukan hanya sebagai strategi pengembangan usaha, tetapi juga sebagai strategi fiskal daerah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji pemanfaatan potensi lokal melalui hilirisasi produk UMKM sebagai upaya meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat melalui studi literatur. Kajian difokuskan pada pengembangan produk olahan *Mocaf* dan lele vakum di Kabupaten Pringsewu, serta peluang penerapannya di daerah lain di Provinsi

Lampung, seperti kopi robusta di Lampung Barat serta pariwisata dan kerajinan Tapis di Lampung Selatan dan Pesawaran. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pendampingan UMKM dan memperluas sumber pendapatan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur *(literature review)* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mengkaji dan menganalisis optimalisasi potensi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kesejahteraan masyarakat, serta kemandirian fiskal daerah. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami dan menggambarkan permasalahan penelitian berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka yang relevan.

Fokus penelitian diarahkan pada hubungan antara pemanfaatan potensi ekonomi daerah, hilirisasi produk lokal, peningkatan PAD, dan penguatan kemandirian fiskal. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen, serta sumber pustaka lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi pembahasan, kesesuaian dengan tujuan penelitian, dan kredibilitas sumber informasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Tahapan pengumpulan data meliputi penelusuran literatur, identifikasi sumber yang relevan, seleksi bahan pustaka, serta pencatatan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Informasi yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan pokok pembahasan, yaitu potensi ekonomi daerah, hilirisasi produk lokal, pengelolaan PAD, kesejahteraan masyarakat, dan kemandirian fiskal daerah.

Keabsahan data dijaga melalui pemeriksaan relevansi, kredibilitas, dan konsistensi informasi dari berbagai sumber pustaka. Pemeriksaan dilakukan dengan membandingkan informasi antarsumber untuk memastikan bahwa data yang digunakan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Penelitian ini tidak melibatkan partisipan secara langsung karena seluruh data diperoleh dari sumber sekunder. Oleh karena itu, prosedur pengujian instrumen terhadap responden dan pengujian reliabilitas kuantitatif tidak diterapkan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian secara sistematis untuk menjelaskan keterkaitan antara optimalisasi potensi daerah, hilirisasi produk lokal, peningkatan PAD, kesejahteraan masyarakat, dan kemandirian fiskal. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis literatur untuk menjawab tujuan penelitian serta merumuskan gambaran mengenai strategi optimalisasi potensi daerah dalam mendukung peningkatan PAD dan kemandirian fiskal daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Potensi Daerah dan Fiskal Daerah

Potensi suatu daerah mencakup segala aset atau keunggulan yang dimiliki wilayah tersebut guna menunjang akselerasi ekonomi serta menyejahterakan masyarakat setempat. Aset-aset diantaranya meliputi ketersediaan sumber daya alam, kapabilitas tenaga kerja, sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, daya tarik wisata, serta sektor industri dan perdagangan. Lantaran tiap-tiap wilayah mempunyai karakteristik unik serta keunggulan komparatif yang berlainan, pihak pemerintah daerah dituntut untuk memahami sektor-sektor strategis yang selaras dengan realitas di wilayahnya. Upaya menggali potensi daerah tidak melulu sebatas mengeksploitasi kekayaan alam, melainkan juga mencakup peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan ekosistem usaha lokal, hingga perancangan peluang investasi. Optimalisasi ekonomi melalui sektor-sektor unggulan tersebut pada gilirannya mampu memacu pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta mendongkrak tingkat pendapatan penduduk (Valentino & Juwita, 2023).

Pengelolaan potensi daerah menuntut perencanaan yang matang serta strategi yang terarah supaya sumber daya yang tersedia mampu memberikan nilai ekonomi yang optimal. Sebagai contoh, wilayah yang unggul di bidang pertanian dapat merintis industri pengolahan hasil panen demi meningkatkan nilai tambah produk. Pada sisi lain, daerah yang mengandalkan sektor pariwisata perlu mengembangkan destinasi wisata, membenahi sarana penunjang, serta menggandeng para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menyediakan berbagai produk maupun layanan. Pengembangan semacam ini berpotensi memunculkan roda ekonomi baru yang berdampak positif bagi warga sekaligus meningkatkan daya saing wilayah. Di samping itu, potensi ekonomi juga sangat dipengaruhi oleh volume investasi, daya beli masyarakat, serta nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang berfungsi sebagai indikator utama aktivitas ekonomi sekaligus gambaran mengenai potensi perolehan pendapatan bagi daerah tersebut (Apriliani et al., 2026).

Fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Kapasitas fiskal terefleksikan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seraya menekankan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan transfer, dan pendapatan sah lainnya. Sumber PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya. Ketrampilan pemerintah dalam memaksimalkan sumber pendapatan ini menentukan ruang fiskal yang tersedia untuk membiayai beragam kebutuhan pembangunan. Kemandirian fiskal menggambarkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan finansialnya melalui sumber pendapatan sendiri, sehingga ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat dapat diminimalkan (Syafri et al., 2024).

Kemampuan fiskal tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh efektivitas alokasi anggaran. Pemerintah daerah harus menargetkan belanja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memperbaiki infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan mendukung kegiatan ekonomi yang produktif. Pengelolaan

anggaran yang tidak tepat dapat berakibat pada peningkatan pendapatan yang tidak sesuai dengan dampak pembangunan. Situasi ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal harus disertai dengan pengelolaan keuangan yang efisien serta bertanggung jawab. Variasi dalam kapasitas fiskal di antara daerah juga menunjukkan bahwa setiap wilayah memerlukan strategi pengelolaan pendapatan dan belanja yang selaras dengan karakteristik dan potensi ekonominya (Manto et al., 2025).

Potensi daerah dan fiskal daerah saling berhubungan dengan bagaimana perkembangan potensi ekonomi dapat menjadi sumber untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah. Saat sektor seperti pertanian, pariwisata, perdagangan, dan industri mengalami kemajuan, aktivitas ekonomi masyarakat juga akan bertambah. Kenaikan aktivitas itu bisa memperluas objek pajak daerah, meningkatkan penerimaan dari retribusi, dan juga mendorong pertumbuhan usaha yang membantu pendapatan asli daerah. Hubungan antara potensi daerah dan fiskal daerah menunjukkan bahwa potensi ekonomi yang dikelola dengan baik bisa memperkuat kondisi keuangan daerah. Mengembangkan sektor unggulan di suatu daerah juga dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah melalui kegiatan ekonomi yang membawa keuntungan dan nilai tambah bagi daerah (Valentino & Juwita, 2023).

Hubungan tersebut juga menciptakan proses timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan kemampuan keuangan daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah memberi peluang kepada pemerintah untuk mendanai pembangunan infrastruktur, seperti jalan, pasar, fasilitas pertanian, transportasi, dan tempat wisata. Ketersediaan infrastruktur membuat distribusi barang lebih lancar, mengurangi biaya produksi, dan memudahkan masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, perkembangan kegiatan ekonomi bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas sumber pendapatan pemerintah daerah. Efektivitas pendapatan asli daerah, investasi, dan kualitas pembangunan manusia terbukti memiliki hubungan positif dengan kemandirian finansial pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. (Syafri et al., 2024). Hubungan potensi dan fiskal daerah menunjukkan bahwa peningkatan keuangan tidak dapat dipisahkan dari pengembangan aktivitas ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kaitan antara potensi daerah dan fiskal daerah akhirnya berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah bisa memanfaatkan uang daerah untuk meningkatkan pendidikan, memperluas akses layanan kesehatan, membangun fasilitas umum, mengurangi kemiskinan, dan mengembangkan program untuk memberdayakan ekonomi. Jika anggaran dikelola dengan baik, masyarakat akan mendapat peluang untuk mendapatkan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan memenuhi kebutuhan hidup dengan lebih baik. Kesejahteraan masyarakat juga tergantung pada kemampuan pemerintah untuk memastikan manfaat dari pembangunan bisa dirasakan oleh semua orang. Hubungan antara kondisi keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari hubungan antara indikator keuangan daerah dengan keadaan kesejahteraan daerah (Muta'ali, 2019).

Peningkatan kemampuan keuangan juga harus disertai dengan kebijakan pengeluaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah seharusnya tidak hanya berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga memastikan bahwa uang yang diperoleh digunakan untuk program-program pembangunan yang tepat sasaran. Menyediakan anggaran

untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program sosial dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan pajak daerah, dana transfer, dan pengeluaran pemerintah harus dilakukan dengan baik agar kebijakan keuangan bisa memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat (Kusmawati et al., 2025). Pengelolaan keuangan yang tidak tepat bisa membuat peningkatan pendapatan daerah tidak sejalan dengan perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Potensi daerah dan keuangan daerah adalah dua unsur yang saling bertautan dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan kemandirian daerah. Potensi daerah memberikan sumber daya dan peluang ekonomi, sementara keuangan daerah memberikan kemampuan untuk membiayai pengembangan potensi tersebut menjadi pembangunan yang berguna. Mengoptimalkan keduanya dapat memperkuat pendapatan asli daerah, mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, membuka lebih banyak lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Pemerintah daerah perlu mengelola sumber daya dengan cara yang produktif, meningkatkan investasi, dan mengatur anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kerjasama antara pengembangan ekonomi dan pengelolaan keuangan yang baik sangat penting untuk mencapai pembangunan daerah yang mandiri, merata, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Kemandirian Fiskal di Daerah

Kemandirian fiskal merupakan kemampuan suatu daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri tanpa bergantung secara berlebihan pada dana transfer pemerintah pusat. Indikator yang lazim digunakan adalah besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar porsi PAD dibandingkan dana transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), semakin leluasa daerah tersebut menentukan arah pembangunannya sendiri.

Seperti dijelaskan pada bagian pendahuluan, persoalan ketergantungan ini juga tampak di Provinsi Lampung, ketika banyak komoditas masih dijual sebagai bahan mentah tanpa nilai tambah yang maksimal. Kondisi tersebut membuat potensi lokal belum banyak berkontribusi pada penguatan ekonomi daerah, apalagi pada PAD. Karena itu, daerah perlu menggali potensi lokalnya agar PAD dapat meningkat. Beberapa daerah di Provinsi Lampung telah mulai bergerak ke arah tersebut, mulai dari Kabupaten Pringsewu hingga Kabupaten Pesawaran (Hanifah et al., 2025; Winarto & Hanifah, 2025). Pembahasan berikut memaparkan kasus di Kabupaten Pringsewu berupa tepung *mocaf* dan lele vakum siap olah, kemudian peluang replikasinya pada kopi robusta di Kabupaten Lampung Barat dan kain tapis di Kabupaten Pesawaran.

1. Optimalisasi Potensi Daerah Berupa Tepung *Mocaf* di Kabupaten Pringsewu

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Pringsewu, tetapi kajian *Location Quotient* menempatkannya sebagai sektor non-basis yang baru mampu memenuhi kebutuhan di dalam kabupaten. Artinya, besarnya kontribusi sektor ini belum disertai kekuatan untuk menggerakkan perekonomian yang lebih luas. Salah satu komoditas pertanian yang menjadi andalan petani di Lampung adalah singkong, tetapi harga jualnya cenderung berfluktuasi. Ketika singkong dijual dalam bentuk

mentah, petani menanggung ketidakpastian harga, sedangkan nilai tambahnya dinikmati oleh pihak yang mengolahnya pada tahap berikutnya (Widiniarsih & Putri, 2023).

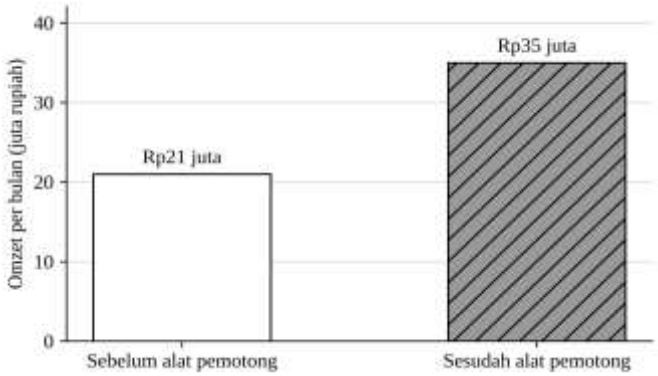
Salah satu upaya untuk mengatasinya adalah mengolah singkong menjadi tepung *mocaf* (modified cassava flour), yaitu tepung singkong yang dimodifikasi melalui proses fisika, kimia, atau biologi. Dengan modifikasi tersebut, singkong yang semula hanya dijual sebagai umbi berubah menjadi produk setengah jadi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri pangan. Produk ini diharapkan memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada singkong mentah (Widayat et al., 2019).

Gambaran manfaat pengolahan ini terlihat pada mitra pengolah *mocaf* di Karanganyar, yang omzetnya naik dari Rp21 juta menjadi Rp35 juta per bulan setelah proses produksinya didukung oleh alat pemotong singkong. Kenaikan sebesar Rp14 juta atau sekitar 67% tersebut menunjukkan bahwa peningkatan produksi pada tahap awal pengolahan, yaitu pemotongan singkong, berpengaruh langsung pada pendapatan usaha. Bagi Kabupaten Pringsewu yang sektor pertaniannya besar tetapi belum menjadi sektor basis, pengalaman ini memperlihatkan peluang untuk mengubah singkong menjadi sumber pendapatan yang lebih besar bagi petani dan pelaku usaha. Dari sisi fiskal, usaha pengolahan yang berkembang memperluas basis ekonomi yang berpotensi menjadi objek pajak dan retribusi daerah, meskipun penerimaannya tetap bergantung pada mekanisme pemungutan yang berlaku.

Tabel 1. Omzet Mitra Pengolah *Mocaf* di Karanganyar per Bulan

Kondisi	Omzet (Rp juta)	Kenaikan (Rp juta)	Kenaikan (%)
Sebelum didukung alat pemotong singkong	21	-	-
Sesudah didukung alat pemotong singkong	35	14	± 67

Sumber: Diolah dari Widayat et al. (2019).



Gambar 1. Perbandingan Omzet Mitra Pengolah *Mocaf* Sebelum dan Sesudah Penggunaan Alat Pemotong

Sumber: Diolah dari Widayat et al. (2019).

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

2. Optimalisasi Potensi Daerah Berupa Lele Vakum Siap Olah di Kabupaten Pringsewu

Di Kabupaten Pringsewu, Kecamatan Pagelaran memiliki ikan lele sebagai komoditas unggulan dengan tingkat permintaan konsumsi yang tinggi. Pada tahap budidaya, kelompok pembudidaya ikan di Desa Patoman, Kabupaten Pringsewu, telah mendapat penyuluhan dan penerapan teknologi *recirculating aquaculture system* (RAS) untuk mengelola kualitas air dan kesehatan ikan. RAS merupakan sistem budidaya yang mensirkulasikan kembali air kolam setelah disaring sehingga kualitas air dapat terjaga. Penguatan di sisi hulu ini menjadi dasar bagi pengolahan hasil panen di sisi hilir (Sarida et al., 2024).

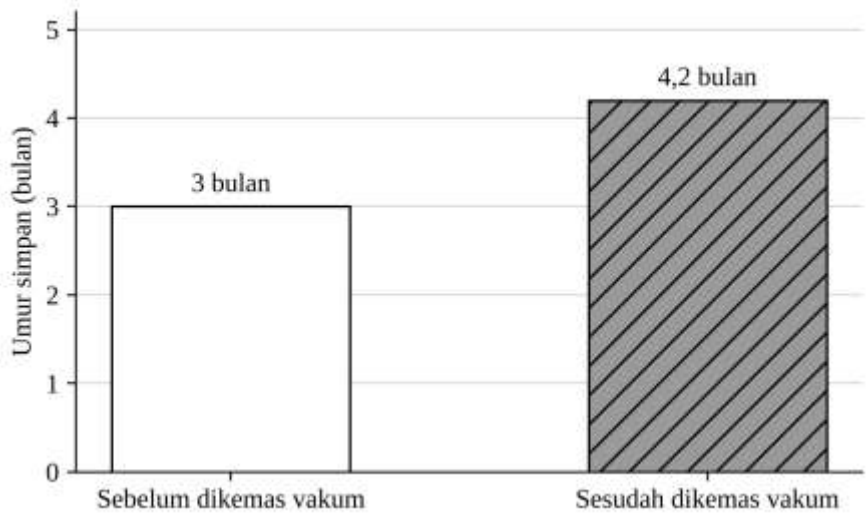
Meski permintaannya tinggi, lele yang hanya dijual dalam kondisi segar membuat harga mudah berfluktuasi. Ikan segar juga mudah menurun kualitasnya sehingga waktu penjualannya terbatas. Pengemasan vakum dapat menjadi salah satu solusinya karena memperpanjang umur simpan produk. Pada Kelompok Kumis Lele di Surabaya, olahan lele beku yang semula hanya bertahan tiga bulan mengalami peningkatan umur simpan sebesar 40%, atau menjadi sekitar 4,2 bulan, setelah dikemas secara vakum. Umur simpan yang lebih panjang memberi pelaku usaha ruang untuk mengatur waktu penjualan dan menjangkau pasar yang lebih jauh tanpa khawatir produk cepat rusak (Trisnawati et al., 2024).

Perubahan umur simpan olahan lele tersebut dirangkum pada Tabel 2 dan Gambar 2.

Tabel 2. Umur Simpan Olahan Lele Beku Kelompok Kumis Lele, Surabaya

Kondisi	Umur simpan (bulan)	Peningkatan (%)
Sebelum dikemas vakum	3	-
Sesudah dikemas vakum	4,2	40

Sumber: Diolah dari Trisnawati et al. (2024).



Gambar 2. Perbandingan Umur Simpan Olahan Lele Sebelum dan Sesudah Pengemasan Vakum

Sumber: Diolah dari Trisnawati et al. (2024).

Selain dijual dalam bentuk segar maupun vakum, lele dapat diolah menjadi produk lain. Di Pekon Podosari, Kabupaten Pringsewu, warga diperkenalkan dengan abon lele sebagai upaya mengatasi kekurangan energi kronik dan stunting (Puspariny et al., 2023). Kasus ini memperlihatkan bahwa olahan lele tidak hanya menambah ragam produk lokal, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dari sisi gizi. Pengolahan semacam ini dapat dijalankan dalam skala rumah tangga maupun UMKM, sehingga selaras dengan karakter UMKM yang padat karya dan memanfaatkan sumber daya lokal sebagaimana dibahas pada pendahuluan.

3. Optimalisasi Potensi Daerah Berupa Kopi Robusta di Kabupaten Lampung Barat

Pola yang sama dengan Pringsewu dapat ditemukan di daerah lain di Lampung. Di Kabupaten Lampung Barat, usahatani kopi robusta berkaitan erat dengan pendapatan dan kesejahteraan petani. Hal ini berarti penghasilan rumah tangga petani sangat dipengaruhi oleh hasil dan harga kopi, sama seperti petani singkong dan pembudidaya lele di Pringsewu yang bergantung pada komoditas utamanya. Apabila kopi hanya dijual dalam bentuk primer, nilai tambahnya belum banyak dinikmati daerah, sehingga Lampung Barat menjadi pembanding yang relevan bagi peluang replikasi hilirisasi di luar Pringsewu (Tania et al., 2019).

4. Optimalisasi Potensi Daerah Berupa Kain Tapis di Kabupaten Pesawaran

Di Kabupaten Pesawaran, Desa Negeri Katon dikenal sebagai sentra kain tapis, yaitu kain tradisional khas Lampung. Lokasinya yang dekat dengan Kota Bandar Lampung serta keberadaan rumah adat Lampung menjadikan desa ini layak dikembangkan sebagai ekowisata berbasis tapis. Dalam konsep ini, tapis tidak hanya dijual sebagai produk, tetapi juga menjadi daya tarik yang mendatangkan pengunjung ke desa, sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan oleh lebih banyak pelaku usaha setempat (Handayani et al., 2023).

Setelah program pemberdayaan dijalankan, pendapatan usaha tapis meningkat lebih dari 25% dan penyerapan tenaga kerja bertambah lebih dari 15% (Handayani et al., 2023). Harga produknya pun bervariasi dari Rp55.000 hingga Rp3.000.000 tergantung jenis kainnya. Rentang harga yang lebar ini menunjukkan bahwa tapis dapat menjangkau berbagai segmen pasar, dari produk berharga terjangkau hingga kain bernilai tinggi.

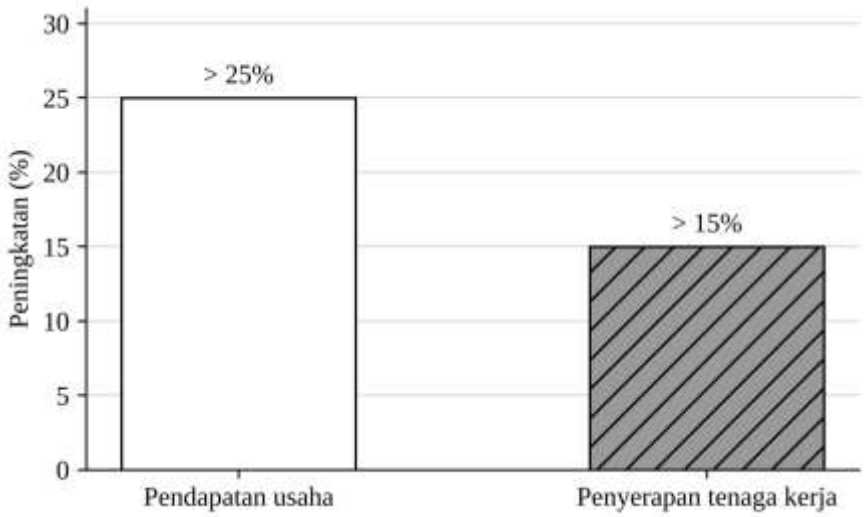
Dampak program pemberdayaan dan rentang harga produk tapis dirangkum pada Tabel 3, Tabel 4, dan Gambar 3.

Tabel 3. Dampak Program Pemberdayaan terhadap Usaha Kain Tapis di Desa Negeri Katon

Indikator	Peningkatan (%)
Pendapatan usaha	> 25
Penyerapan tenaga kerja	> 15

Sumber: Diolah dari Handayani et al. (2023).

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute



Gambar 3. Peningkatan Pendapatan Usaha dan Penyerapan Tenaga Kerja Setelah Program Pemberdayaan

Sumber: Diolah dari Handayani et al. (2023). Nilai menunjukkan batas minimal peningkatan.

Tabel 4. Rentang Harga Kain Tapis

Keterangan	Harga (Rp)
Harga terendah	55.000
Harga tertinggi	3.000.000

Sumber: Diolah dari uraian pada artikel ini.

Namun, manfaat tersebut belum merata. Di Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, ibu rumah tangga memproduksi tapis dalam skala rumahan sebagai tambahan penghasilan, tetapi inovasi produknya masih tergolong lemah. Inovasi yang lemah membuat produk kurang beragam sehingga nilai tambah yang diperoleh pengrajin belum maksimal. Hal ini sejalan dengan gambaran pada pendahuluan bahwa pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam mengembangkan usahanya (Sari et al., 2023).

Kasus-kasus yang dibahas memperlihatkan bahwa komoditas lokal di Provinsi Lampung memiliki potensi nilai tambah yang besar apabila tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Di Kabupaten Pringsewu, singkong yang diolah menjadi tepung *mocaf* berpeluang memperoleh harga jual yang lebih tinggi, sedangkan lele yang dikemas secara vakum memiliki umur simpan yang lebih panjang. Kabupaten Lampung Barat, usahatani kopi robusta memiliki keterkaitan erat dengan tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani. Adapun di Kabupaten Pesawaran, pengembangan usaha kain tapis terbukti meningkatkan pendapatan usaha serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat setempat (Handayani et al., 2023).

Meskipun demikian, tingkat perkembangan setiap komoditas tidak sama. Pengolahan *mocaf* dan lele telah menunjukkan hasil yang cukup nyata, sedangkan kopi robusta dan kain tapis masih menghadapi keterbatasan, terutama dalam hal keragaman produk dan kemampuan pelaku usaha untuk berinovasi. Selama pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat terus meningkat, basis ekonomi daerah akan turut meluas, sehingga membuka peluang bagi

peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Dengan demikian, pengolahan komoditas lokal dapat dipandang sebagai bagian dari upaya daerah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencapai kemandirian fiskal (Sari et al., 2023).

Tantangan dan Strategi dalam Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah

Kemandirian fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai pembangunan serta layanan publik dengan menggunakan pendapatan sendiri, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemampuan tersebut menandai salah satu tolok ukur utama atas keberhasilan penerapan otonomi daerah, sekaligus mencerminkan sejauh mana sebuah daerah dapat mendanai kebutuhan operasinya secara mandiri tanpa harus sepenuhnya bergantung pada dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Di Provinsi Lampung, transfer ke daerah memegang peranan krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta belanja modal tercatat memiliki dampak positif, namun kontribusinya belum mencapai tingkat signifikansi yang bermakna secara statistik. Temuan tersebut menegaskan bahwa upaya konsolidasi kemandirian fiskal masih memerlukan dukungan strategis berupa optimalisasi penerimaan daerah serta implementasi tata kelola anggaran yang lebih produktif (Octarrum, 2025). Dalam penerapannya, upaya tersebut menghadapi beberapa hambatan, mulai dari ketergantungan pada dana yang diberikan pemerintah pusat hingga kurang maksimalnya penggunaan potensi ekonomi daerah.

1. Tantangan dalam Mewujudkan Kemandirian Fiskal Daerah

Beberapa kesulitan yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan antara lain adalah sebagai berikut.

a. Tingginya Ketergantungan terhadap Dana Transfer Pemerintah Pusat

Beberapa pemerintah daerah masih menggunakan dana transfer, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), untuk memenuhi kebutuhan dana dalam pembangunan. Ketergantungan itu menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam mencari penghasilan sendiri masih belum cukup baik. Kondisi ini juga bisa menghalangi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya. Maka dari itu, diperlukan peningkatan sumber pendapatan daerah agar pembiayaan pembangunan tidak terus bergantung pada pemerintah pusat (Latifa et al., 2025).

b. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Ekonomi Lokal

Setiap wilayah memiliki kelebihan tersendiri, misalnya bidang pertanian, perkebunan, perikanan, serta pariwisata. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga beberapa komoditas masih dijual dalam bentuk bahan mentah dengan nilai jual yang tidak terlalu tinggi. Isu ini juga berlaku di Kabupaten Pringsewu, khususnya pada dua komoditas yaitu singkong dan lele yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk olahan yang bernilai tambah, seperti tepung *mocaf* dan lele vakum siap olah.

c. Keterbatasan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Teknologi

Pembangunan daerah memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi. Keterbatasan tersebut dapat menghambat pelaku UMKM dalam meningkatkan kualitas produk, melakukan inovasi, dan memperluas pemasaran. Selain itu, kemampuan pegawai pemerintah dalam mengelola keuangan dan menyusun perencanaan pembangunan juga memengaruhi keberhasilan kemandirian keuangan daerah. Kurangnya kualitas sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal (Latifa et al., 2025).

d. Pengelolaan Anggaran Daerah yang Belum Optimal

Kemandirian keuangan tidak hanya bergantung pada jumlah pendapatan daerah, tetapi juga pada cara penggunaannya yang tepat. Mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kebutuhan sehari-hari bisa mengurangi dana yang digunakan untuk program-program produktif, seperti pengembangan usaha kecil menengah, pembangunan infrastruktur ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memandu penggunaan dana ke program-program yang benar-benar memberi manfaat untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Latifa et al., 2025).

2. Strategi Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, pemerintah daerah harus menggunakan strategi yang fokus pada memperkuat perekonomian lokal dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Beberapa strategi yang bisa dilakukan mencakup hal-hal berikut ini.

a. Mengembangkan Potensi Unggulan Daerah melalui Hilirisasi

Hilirisasi merupakan proses pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan menjadi produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Contohnya adalah pengolahan singkong menjadi tepung *mocaf* dan ikan lele menjadi produk vakum siap olah di Kabupaten Pringsewu. Pengembangan hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah hasil produksi, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Nazikha & Rahmawati, 2021).

b. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing UMKM

Pemerintah daerah harus membantu para pelaku UMKM dengan memberikan pelatihan dalam mengolah produk, mengemas barang, meningkatkan kualitas, dan memasarkan usaha secara online. Dukungan itu dibutuhkan supaya produk dalam negeri bisa ikut berkompetisi di pasar yang lebih besar. Diharapkan pertumbuhan usaha mikro kecil menengah dapat meningkatkan penghasilan masyarakat, membuat lebih banyak pekerjaan, serta memperkuat perekonomian daerah.

c. Mengoptimalkan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah bisa dicapai dengan mencari potensi wajib pajak, meningkatkan proses administrasi perpajakan, dan menggunakan teknologi digital untuk pembayaran serta pengawasan. Optimalisasi penerimaan pajak sebaiknya dilakukan dengan cara memperluas jumlah orang yang membayar pajak serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, bukan hanya dengan menaikkan tingkat pajak. Dengan demikian, penerimaan daerah bisa ditingkatkan tanpa menambah beban bagi masyarakat dan pelaku usaha.

d. Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Daerah

Pemerintah daerah harus memprioritaskan penggunaan dana untuk kegiatan yang menghasilkan nilai ekonomi, misalnya membangun infrastruktur untuk produksi, memperbaiki fasilitas pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta membantu usaha mikro, kecil, dan menengah. Penggunaan dana juga harus diawasi dan dievaluasi agar sesuai dengan tujuan pembangunan. Penganggaran berbasis kinerja penting untuk meningkatkan efektivitas pengeluaran daerah (Latifa et al., 2025).

e. Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Pembangunan daerah membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, seperti pemerintah, universitas, koperasi, pengusaha, dan institusi keuangan. Kerja sama itu bisa membantu meningkatkan produk buatan dalam negeri dengan memberikan ilmu, teknologi, akses ke dana, serta jaringan penjualan. Dengan bekerja sama, masyarakat diharapkan bisa mengelola sumber daya daerah dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kemandirian keuangan daerah tidak hanya bisa dicapai dengan meningkatkan pajak dan retribusi, tetapi juga memerlukan pengembangan potensi ekonomi lokal serta pengelolaan anggaran yang baik. Pengolahan komoditas seperti singkong menjadi tepung *mocaf* serta pengembangan lele vakum di Kabupaten Pringsewu bisa menjadi cara untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Namun, peningkatan kegiatan UMKM tidak langsung meningkatkan pendapatan asli daerah karena masih harus melalui proses penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi sesuai peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, kerja sama antara pengembangan potensi lokal, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, peningkatan pendapatan yang optimal, serta pengelolaan anggaran yang baik menjadi hal penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian keuangan daerah.

KESIMPULAN

Potensi daerah dan kemampuan fiskal daerah saling berkaitan erat. Potensi ekonomi yang dikelola dengan baik akan menggerakkan aktivitas usaha, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Perluasan kegiatan ekonomi tersebut pada akhirnya memperbesar basis pajak dan retribusi daerah, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian fiskal dapat menguat. Hubungan ini bersifat timbal balik, karena PAD yang meningkat juga dapat dipakai untuk membiayai infrastruktur dan pelayanan publik yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kasus di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa komoditas lokal akan lebih bernilai jika tidak dijual sebagai bahan mentah. Singkong dapat diolah menjadi tepung *mocaf*, lele dapat dikemas vakum agar lebih tahan lama, sedangkan kopi robusta dan kain tapis masih perlu dikembangkan melalui diversifikasi produk dan inovasi. Meski begitu, peningkatan usaha masyarakat tidak otomatis menaikkan PAD, karena manfaatnya baru masuk ke kas daerah melalui pajak dan retribusi yang berlaku. Dengan demikian, hilirisasi perlu dipandang sebagai strategi ekonomi sekaligus strategi fiskal daerah.

Kemandirian fiskal masih terhambat oleh ketergantungan pada dana transfer pusat, potensi lokal yang belum dimanfaatkan maksimal, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta pengelolaan anggaran yang belum efektif. Karena itu, penguatan kemandirian fiskal tidak cukup dengan menaikkan penerimaan, tetapi juga harus disertai pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan akuntabel.

Menurut kami, pemerintah daerah perlu lebih serius menggali potensi unggulan melalui pendampingan UMKM, pelatihan pengolahan dan pengemasan, akses permodalan, serta perluasan pemasaran. Upaya ini akan berhasil jika dijalankan bersama pelaku usaha, masyarakat, dan pihak swasta. Dengan begitu, potensi daerah dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian fiskal secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Apriliani, N. K. N. L., Nurfadillah, A., & Patricia, A. (2026). Potensi Penerimaan Fiskal di Daerah: Tinjauan dari Dinamika Konsumsi, Tren Investasi, dan Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia. Jurnal Aplikasi Perpajakan, 7(1), 1-18.

Armediawati, M., et al. (2025). Penguatan ekonomi petani melalui peningkatan nilai tambah singkong dalam produksi *Mocaf*. Indonesian Journal of Empowerment, Service, and Training, 1(2), 96–112.

Dewi, Y. F., & Susilawati, S. (2024). Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Guna Meningkatkan Kemandirian Fiskal Wilayah. Jurnal Ekonomi Utama, 3(3), 463-472.

Handayani, A., Ardiansyah, M., Juwita, M. N., Rahmawati, A., & Malik. (2023). Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekowisata berbasis kain tapis di Desa Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Jurnal Pengabdian UMKM, 2(2), 91–97.

Hanifah, Z., Frinaldi, A., Putri, N. E., & Asnil. (2025). Analisis strategi optimalisasi pendapatan asli daerah dalam mewujudkan kemandirian fiskal di Kabupaten Padang Pariaman. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10(4), 373.

Kusmawati, Z. D., Atsnaa, N. T., Masruroh, U., Astuti, P., Indrawati, L. R., & Rahmah, S. (2025). Kontribusi fiskal daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat: Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah. Journal of Economics Research and Policy Studies, 5(3), 653-665.

Latifa, A., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2025). Desentralisasi fiskal: Tantangan pengelolaan pengeluaran daerah dalam mewujudkan otonomi keuangan daerah. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, 7(3), 411–417.

Manto, A. F., Canon, S., Payu, B. R., & Olilingo, F. Z. (2025). Analisis Tipologi Daerah di Indonesia Berdasarkan Kapasitas Fiskal Daerah. Jurnal Studi Ekonomi dan Pembangunan, 3(2).

Maryati, Dessy Eka Kuliahsari, & Andi Roy. (2024). Aplikasi pengemasan vakum dan desain label kemasan untuk meningkatkan masa simpan dan nilai jual produk ikan asap di Kabupaten Fakfak. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 14(2), 373–378.

Muta'ali, L. (2019). Kemampuan Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten-Kota di Provinsi Jawa Tengah. Majalah Geografi Indonesia, 33(2), 69-80.

Nazikha, R. S., & Rahmawati, F. (2021). Pengaruh desentralisasi fiskal, kapasitas fiskal daerah, dan elastisitas fiskal terhadap pertumbuhan inklusif Indonesia. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan, 1(2), 120–134.

Nurhasanah, S., et al. (2026). Pengaruh faktor fiskal, demografi, ekonomi, dan tata kelola pemerintah terhadap kemandirian fiskal provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera tahun 2018–2025. Indonesian Journal of Economics Management and Accounting, 3(7).

Octarrum, D. (2025). Kemandirian fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah: Peran transfer fiskal, PAD, belanja produktif pada kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. *Salam (Islamic Economics Journal), 6*(2), 438–453.

Puspariny, C., Anggraini, & Suharman. (2023). Manfaat abon lele untuk kekurangan energi kronik dan stunting di Pekon Podosari Pringsewu. Jurnal Perak Malahayati: Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(2), 244–249.

RACHMAWATY, D. R. (2022). Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada UMKM di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Saksono, H. (2025). Sisi ekonomi inovasi daerah: Model terintegrasi komersialisasi dan monetisasi untuk kemandirian fiskal daerah. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 9(1), 1–16.

Sari, Y., Sulastri, & Nafiah, H. (2023). Analisis inovasi produk terhadap nilai guna tapis di Desa Kalirejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Jurnal Suara Pengabdian 45, 2(3), 6–13.

Sarida, M., Setyawan, A., Sulistiono, W. E., Alfina, R., & Azizah. (2024). Penyuluhan dan penerapan teknologi recirculating aquaculture system (RAS) untuk pengelolaan kualitas air dan kesehatan ikan lele pada Pokdakan Bintang Rosela Jaya di Desa Patoman, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Jurnal Abdi Insani, 11(4), 2053–2062.

Syafri, R. A., Sofilda, E., & Suparyati, A. (2024). Determinan kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 9(4), 277-290.

Tania, R., Widjaya, S., & Suryani, A. (2019). Usahatani, pendapatan dan kesejahteraan petani kopi di Lampung Barat. Jurnal Ilmu Ilmu Agribisnis, 7(2), 149–156.

Trisnawati, C. Y., Lestariningsih, D., & Gunadhi, A. (2024). Peningkatan pemberdayaan Kelompok Kumis Lele dengan penggunaan listrik tenaga surya dan teknologi pengemasan vakum. Jurnal Abdimas Mandiri, 8(3), 331–341.

Valentino, G. I. A. K. A., & Juwita, A. H. (2023). Analisis potensi ekonomi dan pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif, 18(2), 568-579.

Widayat, W., Hadiyanto, H., Satriadi, H., Suzery, M., & Budianto, I. A. (2019). Peningkatan produksi *mocaf* dengan rancang bangun alat pemotong. Jurnal Ilmu Lingkungan, 17(3).

Widiniarsih, D. M., & Putri, D. E. (2023). Analisis Sektor Potensial Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pringsewu. Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Jurnal Ilmiah Multi Science, 14(01), 29-38.

Winarto, J. S., & Hanifah, F. F. (2025). Strategi optimalisasi pajak daerah dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan di Kota Pekalongan. JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan, 8(1), 44.